II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2007).

Menurut Simon Kuznets dalam M.L Jhingan (2002) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Menurut Todaro (2003), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1.1 Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabenya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi

seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

1.2 Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan golongan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

1.3 Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

2. Inflasi

Tingkat inflasi yaitu persentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai suatu ukuran untuk menunjukan sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. (Sadono Sukirno, 2006 : 302) Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara terus menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalnya inflasi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sedangkan pendapatan cenderung tetap, itu berarti bahwa secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang relatif akan menurunkan daya beli 5% juga. (Iskandar Putong, 2000 : 181)

Menurut Samuelson (2004), inflasi merupakan suatu kenaikan dalam tingkat harga umumm dan laju inflasi adalah tingkat perubahan dari tingkat harga umum tersebut. Inflasi juga merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat serta jatuhnya nilai riil mata uang yang dinyatakan dalam persentase.

Jenis inflasi berdasarkan sebabnya, yaitu :

2.1 Demand pull inflation

Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi disatu pihak dan kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (full employment) di pihak lain. Sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak dan penawaran kerja tetap, harga akan naik. Bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukkaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

2.2 Cost push inflation

Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiensinya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya). Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen sehubungan dengan naiknya biaya produksi, yaitu langsung menaikan harga produknya naik

(karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

Efek inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan equity effect, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan produk nasional masing-masing disebut efficiency effect dan output effect.

2.1 Efek terhadap pendapatan (*Equity Effect*)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diutungkan dengan adanya inflasi. Pihak-pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang mendapatkan pendapatan tetap, orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas, demikian juga pihak yang memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari laju inflasi. Sedangkan pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari laju inflasi.

Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bbagi orang lain.

2.2 Efek terhadap efisiensi (*Efficiency Effects*)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa

barang tertentu. Dengan adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan mengubah pola alokasi faktor pproduksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi.

2.3 Efek terhadap output (*Output Effect*)

Inflasi dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan produksi, alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi (hyper inflation) dapat mengakibatkan sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun secara drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan output. Inflasi bisa diikuti dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

3 . Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya (Samuelson, 2004).

Menurut Mangkosoebroto (1998 : 169) pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis (Yuzwar dan Mulyadi, 2003), yaitu:

3.1 Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang.

3.2 Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

3.3 Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran masa mendatang.

3.4 Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Pengeluaran dalam anggaran pemerintah di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Mangkoesoebroto, 1998):

3.1 Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga pinjaman, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misalnya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak

ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian.

3.2 Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin.

Menurut Suparmoko (2002) pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sebagai berikut :

3.1 Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.

3.2 Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.3 Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.

3.4 Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Maka pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

3.1 Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.

3.2 Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.

3.3 Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4 Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan.

3.5 Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

4 Teori Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Peacok dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 2002) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacok dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat

walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Menurut Nanga (2005) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G). Dengan adanya kenaikan pengeluaran maka permintaan agregat (AD) akan naik, atau dalam kerangka model AS-AD akan menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan. Dengan kurva AS yang tertentu, maka bergesernya kurva AD ke kanan, akan menyebabkan baik tingkat harga (P) maupun tingkat pendapatan (Y) mengalami kenaikan, seperti dalam gambar di bawah ini.

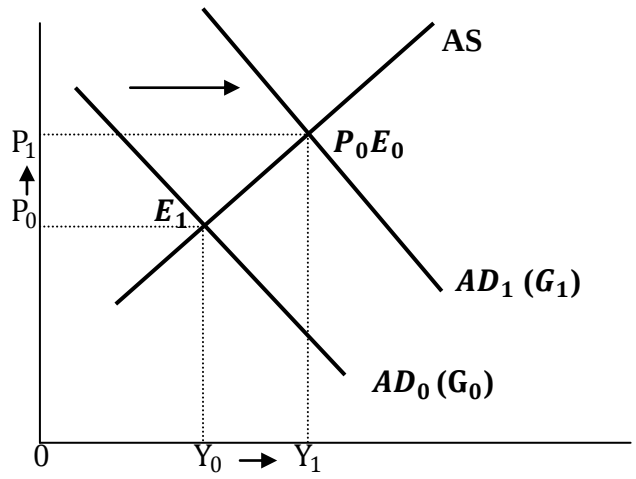

Gambar 5. Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Model AD – AS

Sumber : Nanga, 2005

Terlihat bahwa dengan adanya kenaikan pengeluaran pemerintah dari G_0 ke G_1 telah menyebabkan kurva AD bergeser dari $AD_0(G_0)$ke $AD_1(G_1)$, yang

selanjutnya menyebabkan baik tingkat output (Y) maupun tingkat harga (P) naik masing-masing dari Y_0 ke Y_1 dan P_0 ke P_1.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Pada tahap awal perekembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.
Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perekembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran - pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu.

Dalam teori makro, pengeluaran pemerintah dan pajak-pajak mempunyai dampak terhadap permintaan agregat dari barang dan jasa di dalam perekonomian. Jadi, keduanya bisa diubah-ubah besarnya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dari masyarakat. Penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mencapai tujuan makro ekonomi tertentu tersebut disebut kebijakan fiskal (*fiscal policy*). Jika diketahui bahwa permintaan agregat (AD) lebih besar daripada tingkat output *full-employment*, Y_N atau AD $>Y_N$ seperti ditunjukkan dalam grafik berikut.

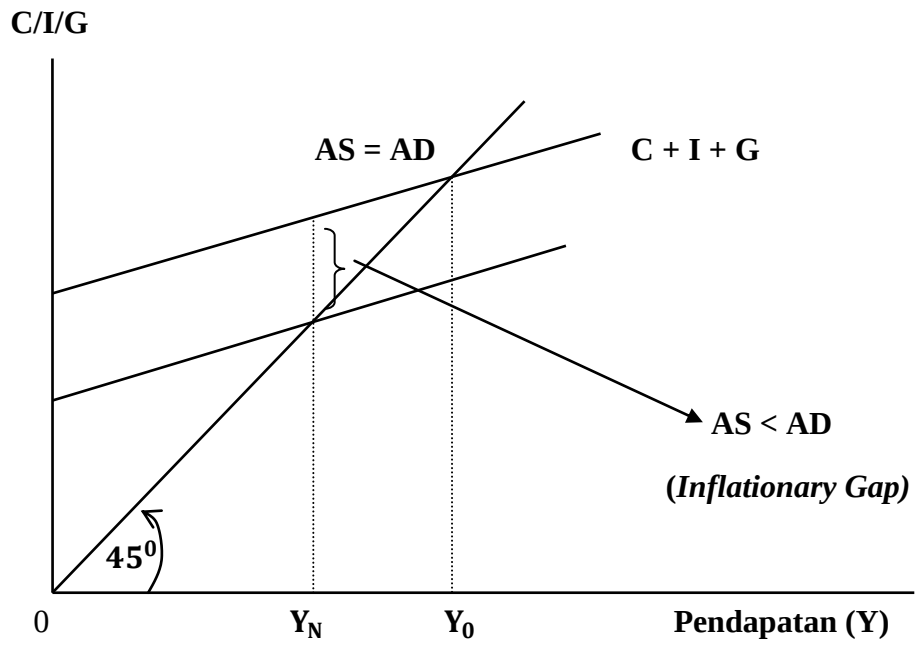

Gambar 6. Kebijakan Fiskal dan Inflasi

Sumber : Nanga ,2005

Dengan permintaan agregat yang lebih besar daripada tingkat output *full employment* (AD >Y_N), maka tingkat harga akan mempunyai tendensi untuk meningkat (terjadi inflasi). Untuk mengeliminasi kelebihan permintaan agregat, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang kontraktif yaitu melalui penurunan pengeluaran (G) atau peningkatan penerimaan pajak (T). Dengan penurunan di dalam permintaan agregat, maka kecenderungan tingkat harga (*price level*) untuk meningkat dapat dikurangi atau dicegah (Nanga, 2005).

Dalam teori Keynes menyatakan bahwa jika perekonomian berada di bawah *full employment*, maka permintaan agregat dapat ditingkatkan atau dinaikkan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) atau tingkat pajak (t). Didalam kondisi perekonomian yang mengalami depresi yang parah, kebijakan moneter yang dilakukan melalui penurunan tingkat bunga

mungkin tidak begitu efektif, dan bahwa permintaan agregat dapat dinaikkan dengan cepat hanya melalui kebijakan fiskal. Dalam kaitan ini Keynes mengatakan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur permintaan agregat (AD) dalam rangka mempertahankan atau menjaga agar perekonomian mendekati tingkat kesempatan kerja penuh *(full employment)* (Nanga, 2005).

5 Teori Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi

Kurva Phillips pertama kali dikemukakan oleh A.W. Phillips, pada tahun 1958.Phillipsmenyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan perubahan tingkatupah. Phillips menggunakan perubahan tingkat upah karena upah akan mempengaruhi hargabarang dan jasa dan pada akhirnya juga mempengaruhi inflasi. Pada perkembangannya, kurvaPhillips yang digunakan oleh para ekonom saat ini berbeda dalam penjelasan mengenai hubunganyang terdapat dalam kurva tersebut.Phillips menyatakan bahwa perubahan tingkat upah dapatdijelaskan oleh perubahan tingkat pengangguran.

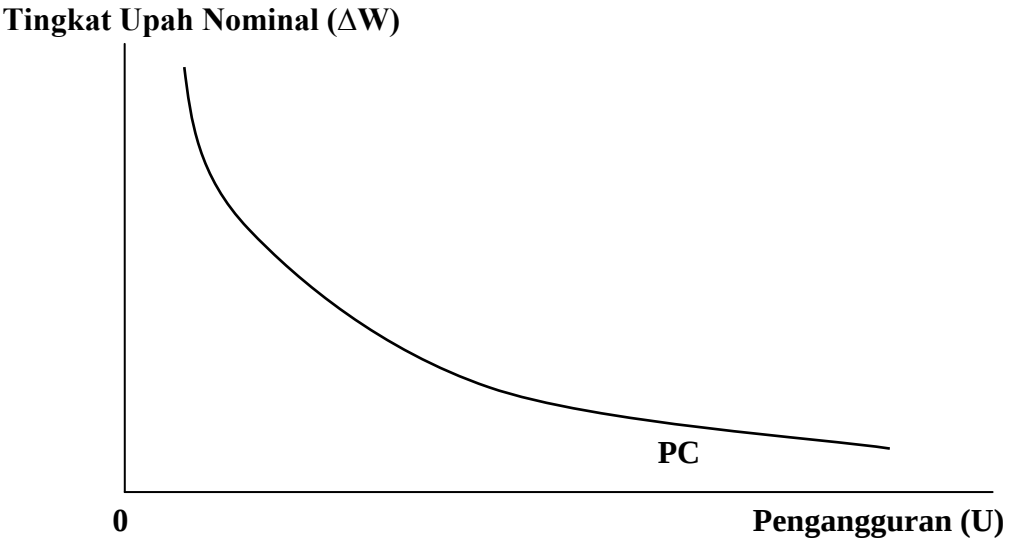

Gambar 7. Kurva Philips

Sumber : Nanga, 2005

Bentuk kurva Phillips memiliki kemiringan menurun, menunjukkan hubungannegatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik,pengangguran rendah, ataupun sebaliknya.Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitasharga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berartibahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran rendah, sebagaikonsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Dengan kata lain, kurvaini menunjukkan adanya *trade-off* (hubungan negatif) antara inflasi dan tingkat pengangguran,yaitu tingkat pengangguran akan selalu dapat diturunkan dengan mendorong kenaikan laju inflasi,dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikantingkat pengangguran. Terjadinya *trade off* antara inflasi dan pengangguran maka para pengambil kebijakandihadapkan pada dua pilihan, apakah harus menerima inflasi yang tinggi dengan tingkatpengangguran yang rendah atau sebaliknya. Hal ini akan berpengaruh terhadap GDP, yangselanjutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.Sejalan dengan itu hukum Okun (Okun law) menyatakan bahwa setiap pengurangan penganggguransatu persen, maka GDP riil akan naik 2,5 persen (Samuelson, 2004).

Dalam Samuelson (2004) menyatakan bahwa inflasi mengurangi efisiensi ekonomi karena mendistorsi harga dan sinyal harga. Pada perekonomian dengan inflasi yang rendah, jika harga pasar suatu barang naik, para pembeli dan penjual

mengetahui bahwa telah terjadi perubahan pada kondisi penawaran dan / atau permintaan barang tersebut, dan mereka dapat bertindak secara tepat.

6 Teori Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Inflasi

Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat, atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut, meliputi tiga jenis perbelanjaan: konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I), dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa (G). Dengan demikian keadaan yang menciptakan persamaan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah sebagai berikut (Sadono, 2006) :

$$Y = C + I + G \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad 2.1$$

Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposebel. Pendapatan disposebel merupakan pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan.Sebagai akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sector pendapatan telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposebel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan persamaan sebagai berikut:

$$Y_d = Y - T \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad 2.2$$

Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan pendapatan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung (Sadono, 2006). Pajak yang lebih tinggi ini akan mengurangi keuntungan dari produsen dan berimbas pada harga. Dampaknya adalah penawaran agregat turun (karena penurunan insentif swasta), sementara permintaan agregat meningkat (karena teknik pembiayaan yang inflasioner) dan pada akhirnya mengakibatkan inflasi. Seiring berjalannya waktu, inflasi secara signifikan mengakibatkan pengambilan keputusan pemerintah menjadi rumit.Ketika kebijakan fiscal yang semula sebagai elemen penting dalam mencapai stabilitas harga, ternyata juga dipengaruhi inflasi itu sendiri. Inflasi menaikkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah yang secara simultan dapat menaikkan penerimaan negara, dimana peningkatan fiscal pemerintah memiliki tingkat kecepatan yang berbeda (Shohabi, 2014).

B.Tinjauan Empirik

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Harjanto pada tahun 2014 tentang "Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia ". Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Kemenkeu, Bank Dunia, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, berupa data tahunan periode untuk periode (1971-2013). Pembahasan mengacu pada hasil pengujian secara empiris dan faktual. Peneliti menggunakan uji kausalitas Toda-Yamamoto digunakan untuk menjelaskan hipotesis yang menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah

berlaku hubungan kausalitas satu arah dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah sesuai dengan hukum Wagner yang menyatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah terjadi seiring dengan meningkatnya perekonomian. Hal ini dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah digunakan sebagai alat atau kebijakan penyeimbang *(countercyclical)* untuk menanggapi perkembangan ataupun siklus perekonomian yang terjadi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rikwan E.S. Manik pada tahun 2010 tentang " Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara ". Peneliti ini mengkaji tentang ada tidaknya hubungan jangka panjang (kointegrasi) dan hubungan timbal balik (kausalitas) antara total pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan menggunakan metode *cointegration test* dan *Granger Causality Test* dengan kurun waktu 1972 - 2006. Dalam penelitian disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengalami tren yang terus meningkat dari tahun 1972 – 2006, kecuali pada tahun 1998 yang turun secara signifikan sebagai akibat krisis moneter. Dari uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Sedangkan dari uji *Granger Causality* tidak ditemukan adanya hubungan timbal balik (kausal) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, tetapi

memiliki hubungan yang searah, yakni pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Shohabi pada tahun 2014 tentang " Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, dan Pendapatan Nasional di Indonesia ".penelitian menggunakan tiga variabel yaitu pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kausalitas antara rasio pengeluaran pemerintah dan inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang menunjukkan hubungan dua arah *(feedback).* Kenudian untuk hasil uji kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional menunjukkan kausalitas satu arah dalam jangka pendek, yaitu dari pendapatan nasional ke rasio pengeluaran pemerintah, sedangkan dalma jangka panjang menunjukkan adanya hubungan dua arah (*bidirectional causality).* Sehingga dalam jangka panjang Wagner's Law dan hipotesis Keynesian sama-sama berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek perubahan rasio pengeluaran pemerintah belum memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kemudian untuk hasil uji kausalitas antara pendapatan nasional dan inflasi, dalam jangka pendek terjadi kausalitas dua arah. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat inflasi jangka pendek menyebabkan perubahan dalam output nasional yang mengakomodasi model upah kaku. Namun dalam jangka panjang akan terjadi penyesuaian upah, sehingga hanya terjadi kausalitas searah yaitu dari pendapatan ekonomi ke inflasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana Kranti Rizki pada tahun 2012 berjudul “ Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Inflasi dan Pengangguran (Studi Kasus Kota Kabupaten se-Jawa Timur Tahun 2006-2010) “. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan pengangguran yang menggunakan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan uji stasioner yang dipergunakan untuk melihat apakah ada sifat autokorelasi atau heterokedastisitas. Yang selanjutnya adalah uji Kointegrasi yang dipergunakan untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang antar variabel. Dan yang terakhir adalah menggunakan uji Granger Causality yang berguna untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Berdasarkan hasil uji kointegrasi telah diketahui bahwa antara tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi serta tingkat pengangguran terdapat hubungan jangka panjang. Dan dalam hasil hipotesis menyatakan bahwa terjadi hubungan timbal balik (*causality*) antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks inflasi tidak terbukti. Dikarenakan terjadi hubungan searah antar kedua variabel (*Uninderectional Causality*), yaitu jumlah pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap indeks inflasi. Hubungan timbal balik (*causality*) antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran tidak terbukti, dikarenakan terjadi hubungan searah antara kedua variabel (*Uninderectional Causality*), yaitu jumlah pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap indeks inflasi. Hubungan timbal balik *(causality)* antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks inflasi terbukti. Dikarenakan terjadi

hubungan dua arah antar kedua variable *(Uninderectional Causality)*, yaitu jumlah pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap indeks inflasi, dan indeks inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pengangguran.Inflasi di Jawa Timur seringkali mengalami peningkatan sehingga inflasi merupakan komponen dalam perekonomian yang cukup sulit untuk diprediksi dan seringkali berbeda dari target inflasi yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya inflasi, seperti permintaan agregat yang tidak diimbangi oleh peningkatan penawaran agregat, melemahnya nilai tukar rupiah, dan ekspektasi masyarakat tentang inflasi juga berpengaruh pada perubahan tingkat inflasi. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari adanya inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum, distribusi pendapatan yang tidak merata, tingkat bunga yang semakin tinggi, dan menurunnya kegiatan investasi. Tingkat pengangguran di Jawa Timur juga selalu mengalami penurunan, hal ini disebabkan tingkat pengangguran di Jawa Timur cenderung dipengaruhi jumlah lapangan kerja yang semakin banyak dan masyarakat Jawa Timur sudah mampu untuk berinovasi dalam mengembangkan usahanya, yang berakibat pada terserapnya jumlah pekerja yang banyak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Engla Desnim Silvia, Yunia Wardi dan Hasdi Aimon pada tahun 2013 tentang “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi Di Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait seperti laporan tahunan, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), BPS

(Badan Pusat Statistik) berbagai edisi. Data seluruh variabel yang akan diteliti ini dimulai dari kuartal I tahun 2001 sampai dengan kuartal IV tahun 2011 dengan jumlah data (n) adalah 44 periode. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga uji analisis yaitu uji stasioneritas, uji kointegrasi dan uji kausalitas granger dengan menggunakan tiga variable yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi dan inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan arti kata, apabila konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor meningkat sedangkan inflasi menurun maka akanberdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Begitu sebaliknya, apabila konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor menurun sedangkan inflasi meningkat maka akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi dan pertumbuhanekonomi berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. Dengan arti kata, apabila pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi meningkat sedangkan jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi turun maka akan berdampak terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Begitu sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menurun sedangkan jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi meningkat maka akan berdampak terhadap penurunan investasi di Indonesia.Pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, dan suku bunga berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Dengan arti kata, apabila jumlah uang beredar meningkat sedangkan pengeluaran pemerintah

dan suku bunga menurun maka akan berdampak terhadappeningkatan inflasi di Indonesia. Begitu sebaliknya, apabila jumlah uang beredar menurun sedangkan pengeluaran pemerintah dan suku bunga meningkat maka akan berdampak terhadap penurunan inflasi di Indonesia.